

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Chandra, Septa, Crijns Jan, Hadisuprpto Paulus, O.S.Hiariej, Eddy, Kelk, Constantijn, Van der Leun, Joanne, Moerings, Martin, Okta, Siradj, Putri, Sumika Nella, Rachman, Taufik, Rozah, Umi, L.Sahetapy, Elfina, Santoso, Topo, Sulistio, Faizin, Voorde ten, Jeroen, Windari, Rusmilawati, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Daniel, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.3.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonseia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- E, Paulus Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono Hs, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,
- Krisnawan dkk, Dani, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus Kejahatan Politik, Pencucian Uang, Narkotika, Korupsi, Pengadilan HAM, Psikotropika, Terorisme, Suap, Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- M.A, Aristo Pangaribuan, Mufti Arsa, Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardalis, 2006, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kedepalan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- ....., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- ....., 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- ....., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2014, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- O.S Hiariej, Eddy, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pramadya Puspa, Yan, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ....., 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- ....., 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- ..... 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenada Media Group, Jakarta.
- ....., 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutarto, Suryono, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- ....., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- ....., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- ....., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- ....., dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsudin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Togat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 101-102.
- Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme; kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Zulfa, Eva Achjani, Akbari, Anugerah Rizki, Samad, Zakky Ikhsan, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT. Raja Grafindo, Depok.

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 ).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

*Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, Adopted by First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in Geneva in 1955, Privileges.*

### C. Tesis.

Achmad Surya, 2012, *Kebijakan Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman*, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soleh Joko Sutopo, 2012, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi sebagai Wujud Pembinaan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)*, Tesis, Program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Ida Bagus Made Danu Krisnawan, 2016, *Kebijakan Formulatif Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime dalam Sistem Pemasyarakatan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Sriyono, 2017, *Kajian Kelayakan Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator*, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhamad Arif Rohman, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan bersyarat bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

I Wayan Eddy Kurniawan, 2017, *“Implikasi Status Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis, Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, hlm.8.

#### D. Jurnal Hukum.

- Paramarta, Y.Ambeg, dkk, 2016, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Percetakan Pohon Cahaya.
- Simarmata, Berlian, 2011, Dosen Acara Pidana Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan , *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3.
- Edie, Toet Hendratno, 2013, *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-44, Nomor.4.
- Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Widodo, Supriyadi Eddyono, 2011, *Prospek Penggunaan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK, Volume 1, Nomor 1.
- Pujiyono, 2012, “*Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.41, Nomor I.
- Perdani, Dessi Yuris Puspita Sari, *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.2 Mei 2010.
- Jalu, Amanda Karya, Ramadina Savitri, 2015, *Permohonan Pencabutan Hak Remisi Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, Nomor 1.
- Ilmiah Analisa, Majid Abdul, Harjati Eny, 2014, *Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatn Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## E. Internet.

<http://lapasmataram.com/profil-lapas.php>, diakses pada 25 September 2018, pukul 11.32 WIB.

Joko Panji Sasongko, “Yasonna tegaskan Remisi Nazaruddin dan Gayus Sesuai aturan”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818163040-12-235696/yasonna-tegaskan-remisi-nazaruddin-dan-gayus-sesuai-aturan>, diakses pada 16 Januari 2018, pukul 15.30 WIB.

Rommy Pujiyanto, Yasonna Kukuh Permudah Remisi,  
[https://mediaindonesiacom.cdn.ampproject.org/v/m.mediaindonesia.com/amp/amp\\_detail/62738-yasonna-kukuh-permudah-remisi-](https://mediaindonesiacom.cdn.ampproject.org/v/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/62738-yasonna-kukuh-permudah-remisi-), diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 17.38 WIB

Lutfy Mairizal Putra, “Permudah Pemberian Remisi dinilai Melanggar Filosofi Lapas”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/20/16442311/permudah.pemberian.remisi.dinilai.melanggar.filosofi.Lapas>, diakses pada 5 November 2018 pukul 12:45 WIB.

Lutfy Mairizal Putra, “Jokowi Tolak Remisi Koruptor Dipermudah, Menkumham ambil Jalan Tengah”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/16304561/jokowi.tolak.remisi.koruptor.dipermudah.menkumham.ambil.jalan.tengah>, diakses pada tanggal 07 November 2018 pukul 14:05 WIB.

<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/242-penandatanganan-pakta-intergitas-revolusi-mental-oleh-kepala-rutan-selong-dan-launching-layanan-informasi-mandiri-wbp-berbasis-it>, diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 13:25 WIB

Sandro Gatra, Remisi Koruptor dipermudah,  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/10/14380361/remisi.koruptor.dipermudah>, diakses pada 25 November 2018.

Abba Gabrillin, Ramai-ramai jadi Justice Collaborator,  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/10051561/ramairamai.jadi.justice.collaborator>, diakses pada tanggal 8 November 2018.

Randy Ferdi Firdaus, Ingin dapat remisi, lima napi korupsi gugat UU Pemasarakatan ke MK, <https://m-merdeka-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.merdeka.com/amp/politik/ingin-dapat-remisi-lima-napi-korupsi-gugat-uu-pemasyarakatan-ke-mk>, diakses pada 18 November 2018

<https://www.kpk.go.id/id.berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 09:15 WIB

<https://www.pn.mataram.go.id/link/2017032302555325938155258d3393945dbd.html-sejarah-pengadilan-mataram>, diakses pada tanggal 9 November 2018 pukul 18:30 WIB

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 perihal permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, tanggal 26 November 2013.